

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada pencarian laba yang besar. Kesadaran atas pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham, tapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, di mana menurut pendekatan teori akuntansi tradisional, perusahaan harus memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari adanya dampak-dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk mencapai laba yang maksimal, yang semakin besar dan semakin sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, masyarakat pun menuntut agar perusahaan senantiasa memperhatikan dampak-dampak sosial yang ditimbulkannya dan berupaya mengatasinya.

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredakan atau bahkan menghindari konflik sosial (Kartini, 2009).

Memang saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktik *Corporate Social Responsibility* terhadap keuntungan perusahaan sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap *Corporate Social Responsibility* tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Praktek *Corporate Social Responsibility* akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi jangka panjang, karena dengan melakukan praktek *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapatkan tempat “di hati” dari masyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan (Suharto,2007).

Atas tuntutan – tuntutan tersebut kemudian muncul konsep akuntansi yang baru menggantikan konsep akuntansi tradisional dimana dalam akuntansi tradisional pusat perhatian perusahaan hanya terbatas kepada *stockholders* dan *bondholders*, yang secara langsung memberikan kontribusinya bagi perusahaan, sedangkan pihak lain sering diabaikan. Tanggung jawab moral tersebut lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Corporate Social Responsibility sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan.

Di Indonesia sendiri kelestarian lingkungan sudah menjadi kebijakan pemerintah pada setiap periode. Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Preston (1981) dalam Lindrianasari (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik dan melakukan pengungkapan yang tinggi memposisikan mereka sebagai perusahaan yang memiliki aktifitas yang berguna dan kualitas pengungkapan ini juga didorong legitimasi terhadap masyarakat.

Pemerintah kementerian lingkungan hidup (KLH) berusaha untuk mencegah kerusakan lingkungan dengan mendorong penataan perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup melalui instrumen informasi (Rakhiemah dan Agustia,2009). Namun kinerja lingkungan hanya fokus Pada pengendalian polusi pada pencemaran berkelanjutan (sustainability planning) mengharuskan perusahaan untuk lebih terintegrasi dengan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Seharusnya faktor lingkungan tersebut dapat digunakan pintu masuk implementasi *Corporate Social Responsibility*, terdapat empat dimensi kunci yang harus diperhatikan yaitu, prinsip hak asasi manusia, prinsip berkelanjutan, efisiensi ekonomi dan sosial, dan legitimasi masyarakat untuk melakukan operasi.

Sejak KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) mengadakan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup. Melalui PROPER, kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru, merah, hingga yang terburuk hitam untuk kemudian diumumkan secara rutin

kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat warna yang ada.

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik juga terbukti memiliki kepedulian sosial yang lebih besar terhadap masyarakat maupun tenaga kerjanya. Perusahaan yang peduli dengan kinerja lingkungannya tersebut berarti telah menerapkan *Corporate Social Responsibility* dengan sebagaimana semestinya terbukti dengan tinggi tingkat kepedulian lingkungan dan sosial (Rakhiemah dan Agustia, 2009).

Semakin berkembangnya inisiatif perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan, mengakibatkan adanya kecurangan yang terjadi pada perusahaan antara pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan. Penemuan ini menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan itu belum memadai, karena tidak ada kesesuaian antara informasi yang diungkapkan dengan kinerja yang sesungguhnya (Lindrianasari, 2007). Karena adanya masalah tersebut maka perusahaan perlu diawasi secara khusus untuk meminimalisir adanya kecurangan tersebut.

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilaksanakan secara konsisten dan patuh kepada peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan perlu membentuk Komite Audit yang bekerja secara profesional dan independen untuk membantu Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya.

Keberadaan Komite Audit bukan merupakan substitusi dari fungsi auditor internal yang dibentuk oleh Direksi, tetapi melaksanakan tugas berdasarkan mandat

yang diberikan oleh Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Oleh karena itu Dewan Komisaris harus secara tegas menetapkan program-program yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilaksanakan oleh Komite Audit dalam suatu dokumen yang disebut Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Komite audit merupakan alat bagi banyak pihak dalam menghindari kecurangan dan pelanggaran laporan keuangan dan juga merupakan pihak akhir yang memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan, termasuk dalam hal ini memonitor kualitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Gantjowati dan Nugroho, 2009). Dengan demikian komite audit yang merupakan salah satu fungsi pengawasan dalam perusahaan, dapat dikatakan mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tingkat kualitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan.

Selain sebagai fungsi pengawas pelaporan keuangan perusahaan, komite audit yang dipimpin dewan komisaris pun melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan dalam menjalankan kinerjanya pada masing-masing fungsi. Dengan kata lain, kinerja komite audit dalam mengawasi pihak manajemen, memiliki andil besar dalam penilaian baik buruknya kinerja manajemen perusahaan yang dalam penelitian ini dikhususkan pada kinerja lingkungan.

Keterkaitan perusahaan dengan daerah lingkungan sosialnya menuntut dipenuhinya pertanggungjawaban sosial perusahaan sehingga diperlukannya tata kelola usaha yang baik.

Kesadaran terhadap urgensi pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* dan *Good Corporate Governance* telah disadari banyak pihak. Menurut Sobirin (1999) agar suatu bisnis bisa bertahan maka suatu perusahaan harus merubah kontrak sosialnya dengan memposisikan bisnis sebagai bagian dari sistem sosial dan politik yang ada. Jika perusahaan lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat maka kegiatan bisnis lebih bisa diterima masyarakat. Dengan demikian, penerapan *Corporate Sosial*

Responsibility tidak lagi dianggap sebagai biaya, melainkan investasi jangka panjang perusahaan dalam rangka membangun legitimasi sosial dan citra positif di mata publik yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility* secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan yang dapat memberikan keuntungan ekonomi berupa peningkatan nilai perusahaan.

Alasan Peneliti memilih Proksi Dewan Komisaris dan Komite Audit karena Dewan Komisaris dan Komite Audit memegang peranan penting perusahaan dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris dan Komite Audit memiliki fungsi yang saling berkaitan yaitu untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengelola perusahaan, menilai perusahaan telah melakukan pengungkapan CSR dengan baik dan untuk mengetahui perusahaan yang telah melakukan pengungkapan kinerja lingkungan sudah sesuai atau tidak dengan kinerja lingkungannya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Lingkungan dan *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Sosial Responsibility* study pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dan yang telah masuk dalam kategori PROPER tahun 2016-2018”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap *Corporate Sosial Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang ikut program PROPER selama periode 2016-2018 ?
- b. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Corporate Sosial Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia yang ikut program PROPER selama periode 2016-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebagaimana dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengetahui apakah pengaruh kinerja lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang ikut program PROPER selama periode 2016-2018.
- b. Mengetahui apakah pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang ikut program PROPER selama periode 2016-2018?

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi lebih lanjut yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan tanggung jawab social perusahaan pada kinerja lingkungan
- b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, pertimbangan dan juga dipakai sebagai bahan masukan dan informasi kepada perusahaan agar dapat menerapkan tatakelola dalam perusahaannya dengan baik serta dapat meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan sekitar .